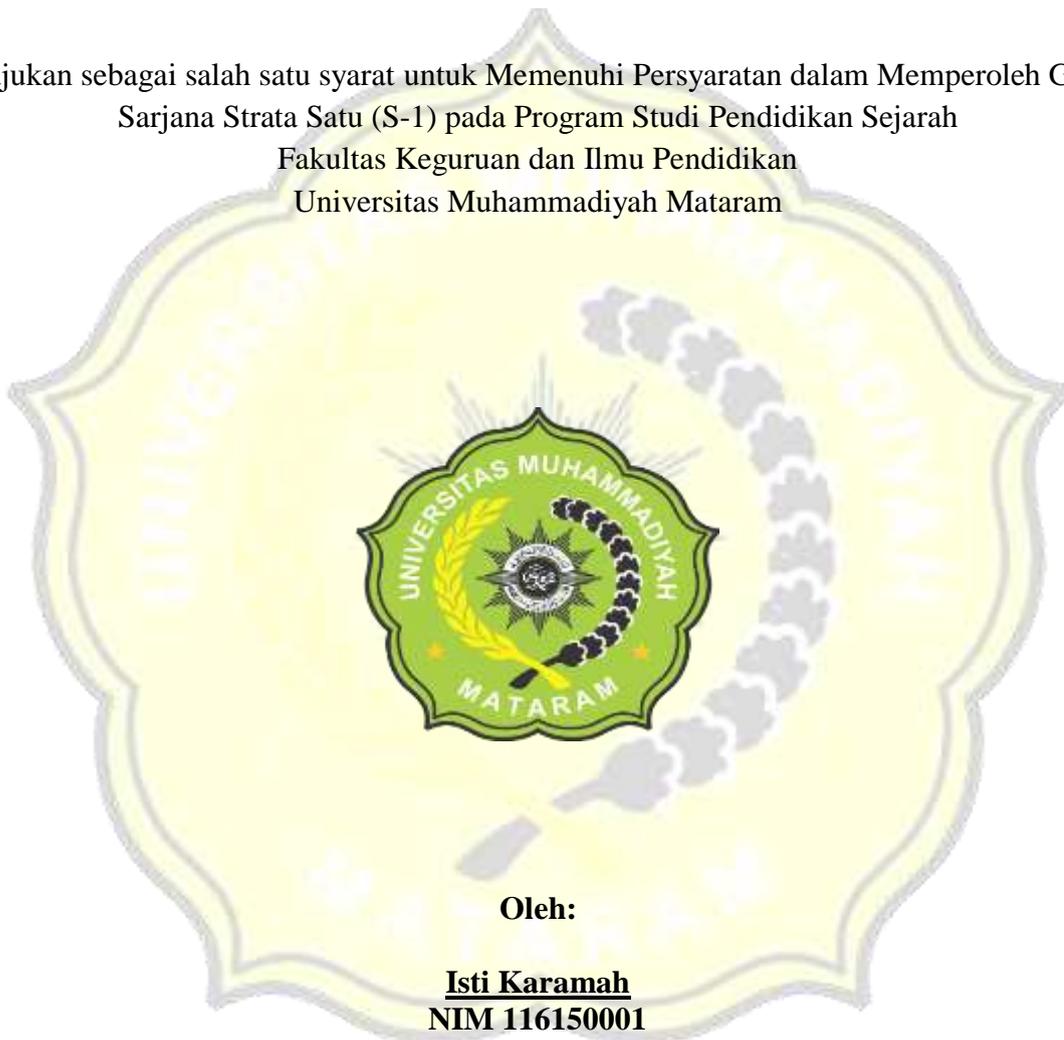


SKRIPSI

**KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMIKIRAN M. NATSIR PASKA
PERANG KEMERDEKAAN INDONESIA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

Isti Karamah
NIM 116150001

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

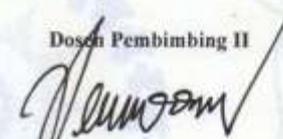
KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMIKIRAN M. NATSIR PASKA
PERANG KEMERDEKAAN INDONESIA

Telah memenuhi syarat dan disetujui
Tanggal, 23 Januari 2021

Dosen Pembimbing I


Ahmad Afandi, S.S., M.Pd.
NIDN. 0819038401

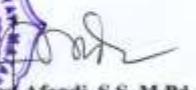
Dosen Pembimbing II


Hriawan Mubin, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0811108504

Menyetujui:

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Ketua Program Studi,



Ahmad Afandi, S.S., M.Pd.
NIDN. 0819038401

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMIKIRAN M. NATSIR PASKA
PERANG KEMERDEKAAN INDONESIA

Skripsi atas nama Isti Karamah dipertahankan di depan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

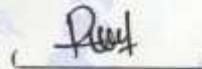
Tanggal, 28 Januari 2021

Dosen Penguji:

1. Hmiawan Mubin, S.Pd., M.Pd. Ketua
NIDN. 0811108504



2. Rosada, S.Pd., M.Pd. Anggota
NIDN. 08221028401



3. Dian Eka Mayasari, M.Pd Anggota
NIDN. 0830098802



Mengesahkan:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Dekan,



Dr. H. Maemunah, S.Pd., M.H
NIDN. 0802056801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Isti Karamah

NIM : 116150001

Alamat: Dusun Pancasila, Desa Tambora, Kec. Pekat, Kab. Bima.

Memang benar Skripsi yang berjudul "Konsep Dan Implementasi Pemikiran M. Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia" adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya, termasuk bersedia menanggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

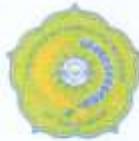
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 23 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Isti Karamah
NIM. 116150001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 104 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641966
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISI Karamah
 NIM : 116150001
 Tempat/Tgl Lahir : DAMPU, 10. 11. 1995
 Program Studi : Pendidikan Sejarah
 Fakultas : F.K.I.P
 No. Hp/Email : 0819 0389 3715
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

konsep dan implementasi pemikiran M. Nohir Paska
Petang kemerdekaan Indonesia

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : 16.02.2021

Penulis

 METERAI
 TEMPEL
 001C6AHFE302002
 6000
 ISI KARAMAH
 NIM. 116150001

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

 Iskandar S. Sa' M.A.
 NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website: <http://www.litb.ummat.ac.id> E-mail: upt.perpustakaanmat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTI KARAMAH
NIM : 116150001
Tempat/Tgl Lahir : DOMPU, 10. 11, 1995
Program Studi : PENDIDIKAN SEJARAH
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 081 807 093 715
Judul Penelitian :-

KONSEP IMPLEMENTASI PEMIKIRAN M. HATSIR
PASKA PERANG KEMERDEKAAN INDONESIA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. AB %/o

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 15. Februari 2021

Penulis



ISTI KARAMAH
NIM. 116150001

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu”

*“jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang,
kadang manusia punya mulut tapi belum tentu punya
pikiran”.*

*“pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan
segala sesuatu tanpa membuatmu kehilangan
temperamen atau rasa percaya diri”*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan bangga penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak M. Amin dan Ibu Misna beserta keluarga yang senantiasa memberi motivasi, dukungan dan berjuang tanpa kenal lelah untuk memerdekakan pendidikan anak-anaknya. Terimakasih atas segala dukungan serta do'a yang tiada henti untuk penulis;
2. Dosen-dosen yang telah mentransferkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa menjadi sekarang ini;
3. Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Universitas Muhammadiyah Mataram.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin. Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT penulis panjatkan atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul “Konsep Dan Implementasi Pemikiran M. Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia” dapat diselesaikan oleh penulis. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Pendidikan Sejarah dan menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu terutama kepada;

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram;
2. Ibu Dr. Hj. Maemunah, M.H Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram;
3. Bapak Ahmad Afandi S.S.,M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah dan selaku dosen pembimbing I penulisan skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram;
4. Bapak Ilmiawan Mubin, S.Pd.,M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai;

5. Kedua orang tuaku tercinta bapak M. Amin dan ibu Misnah yang telah banyak memberikan do'a dan dukungan moril maupun materil hingga skripsi ini dapat selesai;
6. Kakaku ku tercinta, Taufik Hidayat, Juwanda, Hamdan, Julyanti Dewi, As Anggriani, dan juga Adik-Adik yang saya cintai yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan semangat kepada penulis;
7. Guru Bahureksa yang selalu memberi semangat dan dukungan pada saya;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi kepada penulis; dan
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga diharapkan kritik, dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif, memberikan insiprasi dan bermanfaat bagi semua pihak.

Mataram, 23 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASIRISME.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Yang Relevan	7
2.2 Kajian Teori	9
2.2.1 Pengertian Konsep	9
2.2.2 Negara	11
2.2.3 Teori Terbentuknya Negara	12
2.2.4 Konsep Negara Menurut M. Natsir	19
2.2.5 Bentuk-bentuk Negara	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian	29

1.1.1 Jenis Penelitian.....	29
1.1.2 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Jenis dan Sumber Data	30
3.2.1 Jenis Data	30
3.2.2 Sumber Data.....	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data	32
3.4 Teknik Analisis Data	33
3.5 Prosedur Penelitian Historis	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Biografi Pemikiran M. Natsir	40
4.2 Konsep dan Implementasi Pemikiran M. Natsir Paska Perang Indonesia.....	43
4.2.1 Sikap Terhadap Pancasila	46
4.2.2 Peranan Dalam Konstituante.....	54
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Simpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68

Isti Karamah, 2021. **Konsep dan Implementasi Pemikiran M. Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia**. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : Ahmad Afandi, S.S.,M.Pd.

Pembimbing II : Ilmiawan Mubin, S.Pd.,M.Pd.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep dan Implementasi Pemikiran M. Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan metode historis.

Hasil penelitian tentang permasalahan dalam skripsi ini adalah bahwa Negara dalam pemikiran Natsir berfungsi sebagai alat dalam menjalankan syariat Islam. Menurutnya, dengan Islam, negara akan memiliki akar yang kuat. Mengenai bentuk negara, Natsir tidak terpaku dengan bentuk negara apapun, baginya bentuk apa saja boleh asalkan syariat Islam dijalankan. Dalam mewujudkan konsepnya tentang negara dan agama tersebut dibagi dalam tiga periode: (1) Masa sebelum kemerdekaan yang menghasilkan polemik terbuka tentang pemikiran politik Islam dengan Soekarno. (2) M. Natsir tentang dasar negara Islam, lebih merupakan respon M. Natsir terhadap perkembangan politik Indonesia yang telah cukup membawa iklim politik yang menyejukkan semua pihak. Islam melalui semangat pluralisme dan kedinamisannya, tidak bertentangan dengan Pancasila. (3) Majelis Konstituante secara tegas M. Natsir menolak Pancasila dijadikan sebagai dasar negara akibat munculnya pemikiran Soekarno yang menafsirkan Pancasila secara sekuler. Dengan demikian periode-periode tersebut menunjukkan konsistensinya terhadap kedinamisan sistem Islam dalam sebuah negara modern.

Kata Kunci: Konsep, Implementasi, M. Natsir.

Isti Karamah, 2021. *Concept and Implementation of M. Natsir's Thought After Indonesian Independence War*. Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

Supervisor I: Ahmad Afandi, S.S., M.Pd.

Supervisor II: Ilmiawan Mubin, S.Pd., M.Pd.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the concept and execution of M. Natsir's thoughts after the War of Indonesian Independence. Literature review with historical methods is the research method used. The results of research showed that the State functions as a tool in carrying out Islamic law in Natsir's thought. According to him, the state will have strong roots in Islam. As far as the state form is concerned, Natsir is not fixated on any form of state, any form is permissible for him as long as Islamic law is enforced. The conception of state and religion is divided into three periods: (1) The period before independence which resulted in an open polemic about Islamic political thought with Soekarno. (2) M. Natsir regarding the basis of an Islamic state, is more of M. Natsir's response to the development of Indonesian politics which has brought quite a cool political climate to all parties. Islam, through the spirit of pluralism and its dynamism does not go against Pancasila. (3) The immediate Constituent Assembly Natsir rejected Pancasila as the basis of the state due to the emergence of Sukarno's thought which interpreted Pancasila in a secular manner. Thus these periods showed its consistency towards the dynamism of the Islamic system in a modern state.

Keywords: Concept, Implementation, M. Natsir.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ragam dan corak pemikiran mengenai negara selalu menjadi kajian menarik untuk didalami, termasuk di Indonesia. Pemikiran mengenai negara di Indonesia sendiri sudah menjadi perbincangan hangat bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ragam pemikiran tersebut telah banyak melahirkan tokoh nasional seperti Soekarno dengan corak pemikiran nasionalisnya, D.N Aidit dengan corak komunisnya dan Mohammad Natsir dengan corak pemikirannya keIslamannya.

Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam pada masa itu (kemerdekaan), telah melahirkan banyak pemikir Islam yang telah memberikan banyak kontribusi bagi Indonesia. Corak pemikiran para tokoh tersebut sangat beragam karena dipengaruhi oleh latar belakang keagamaan dan lingkungan mereka. Islam di Indonesia sendiri memang sangat beragam, ada yang tradisional, moderat bahkan puritan. Semua bercampur aduk dan melahirkan banyak pemikiran yang beragam.

Melihat banyaknya penganut agama Islam di Indonesia, para pemikir Islam tersebut sadar akan perlunya negara berdasarkan Islam, terutama pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, ada yang mengambil langkah radikal dan ada yang mengambil langkah moderat. Tokoh yang mengambil langkah radikal seperti yang dilakukan oleh Kartosoewirjo dalam memperjuangkan Negara Karunia

Allah Negara Islam Indonesia (NKA-NII) yang biasa disebut dengan DI-TII (Darul Islam- Tentara Islam Indonesia). Adapun yang mengambil langkah moderat dengan tetap menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah seperti yang dilakukan oleh Mohammad Natsir. Walaupun Natsir mengambil langkah moderat dalam mengimplementasikan pemikirannya tentang negara yaitu Islam sebagai dasar negara, masih banyak yang beranggapan bahwa Natsir ingin mendirikan negara Islam dan menolak Pancasila. Dzulfikriddin (2010) dalam bukunya yang berjudul “Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia” menjelaskan, perjuangan Mohammad Natsir dalam menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapatkan penentangan dari kalangan nasionalis dan nonIslam, terutama ketika Natsir memperjuangkannya di Konstituante. Konsekuensi dari pemikiran dan kritik Natsir terhadap Soekarno berakibat pada terancamnya keselamatan Natsir beserta keluarga, sehingga Natsir harus menyelamatkan diri ke Sumatera Barat pada akhir 1957.

Pemikiran Natsir tentang negara dan keberaniannya dalam menyalurkan aspirasinya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, banyak disalahpahami oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Banyak yang mengatakan, Natsir berupaya untuk mendirikan negara Islam dan tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Padahal kalaulah Natsir ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara secara paksa, maka ia bisa melakukannya ketika menjadi Perdana Menteri (PM) pada 1950-1951 (Dzulfikriddin, 2010). Bahkan selaku PM, Natsir tidak segan-segan

mengambil tindakan tegas terhadap kelompok Darul Islam (DI/TII) Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia secara inkonstitusional. Pemikiran tentang Islam sebagai dasar negara republik Indonesia baru ia perjuangkan melalui Konstituante. Namun setelah Konstituante dibubarkan, Natsir tidak lagi lantang dalam menyuarakan pemikiran kenegaraannya yaitu Islam sebagai dasar negara.

M. Natsir adalah salah seorang putra Indonesia yang dikenal sebagai birokrat, politisi dan juga sebagai *da'i* ternama. Sewaktu menjadi ketua Masyumi, ia dikenal dengan kegigihannya memperjuangkan aspirasi Islam melalui Konstituante. Namun sangat disayangkan, aspirasinya yang dikenal sebagai dakwah Islam melalui kekuatan politik tersebut gagal, bahkan partai Masyumi yang dipimpinnya dibubarkan oleh kekuasaan Soekarno pada bulan Desember 1960. Sebagai akibat pembubaran partai Islam tersebut, sebahagian dari tokoh-tokohnya berpecah mencari posisi pada ormas-ormas Islam lainnya. Ada yang bergabung dengan Muhammadiyah seperti Mohammad Kasman Singodimedjo serta ada pula yang bergabung dengan NU seperti Idham Khalid dan Masykur. Mereka kemudian menjadi pemimpin puncak pada ormas tersebut pada periode berikutnya.

M. Natsir tidak mengikuti jejak rekan-rekannya untuk bergabung dengan ormas lain. Menurutnya, berkecimpung di lapangan politik merupakan bagian dari ibadah dan dakwah. Akan tetapi, bila ia tidak lagi mendapat kesempatan untuk berkiprah di lapangan politik, jalan ibadah dan dakwah dalam bentuk lain masih terbuka sangat lebar. Ia kemudian

mengubah jalur dakwahnya. Dengan demikian sesuai dengan mottonya, yaitu bila dulu ia menjalani “dakwah lewat jalur politik,” maka sekarang ia “berpolitik lewat jalur dakwah.” Untuk mewujudkan tujuan dakwahnya, ia mendirikan organisasi dakwah yang bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Selama hidupnya M. Natsir benar-benar mencurahkan seluruh tenaganya demi dakwah islamiyah. Karena jasanya, ia tidak hanya dikenal di Indonesia saja tetapi juga sampai ke luar negeri. Namanya mulai dikenal di dunia internasional sejak ia menjabat Menteri Penerangan RI selama tiga periode serta menjadi Perdana Menteri pertama setelah Indonesia merdeka. Tahun 1952 ia mulai bersentuhan dengan dunia internasional. Saat itu ia mengunjungi Pakistan atas undangan Pakistan Institut of Pakistan Affair. Ia juga mendapat undangan untuk mengunjungi pemerintah Kashmir, Irak, Iran, Libanon, Mesir, Turki, Arab Saudi, India dan Burma

Dari sekilas pemikiran M. Natsir ini timbul kesan singkat bahwa pada dirinya terdapat pemikiran yang berbenturan antara satu sama lainnya. Disatu sisi, secara normatif Islam dalam pandangannya tidak memberikan pola atau bentuk khas dari suatu negara, tetapi disisi yang lain juga ia tidak menghendaki adanya sekularisasi sebagaimana Islam juga dipahami sebagai agama dan Negara.

Oleh karena itu, studi tentang pemikiran dan aksi politik Islam M. Natsir menjadi sangat menarik dan patut untuk diteliti secara mendalam dalam rangka memberikan kontribusi positif yang tinggi bagi upaya

memahami format politik Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan relasi Islam dan negara. Untuk itu judul yang diambil dalam penelitian skripsi ini adalah Konsep dan Implementasi Pemikiran M. Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dengan mengacu judul penelitian ini, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan masalah permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Konsep dan Implementasi Pemikiran M. Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep dan Implementasi Pemikiran M. Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoretis

1. Dapat memberikan gambaran tentang Konsep dan Implementasi Pemikiran M. Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia.
2. Memberi kejelasan secara teoritis tentang Konsep dan Implementasi Pemikiran M. Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia.
3. Memberikan manfaat dan menambah khasanah keilmuan terutama dalam memahami kajian kenegaraan serta dapat digunakan untuk menambah literatur bagi khazanah ilmiah dunia pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri tentang Konsep dan Implementasi Pemikiran M. Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia.
2. Menambah khazanah keilmuan bagi para praktisi pendidikan dalam mengkaji konsep kenegaraan.
3. Memberikan manfaat bagi praktisi pendidikan untuk dapat mengembangkan konsep kenegaraan yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Oleh Amin Susilo yang berjudul “Konsepsi Negara Menurut M. Natsir: Tinjauan Dari Perspektif Pemikiran Politik Islam” Hasil penelitian yang mengkaji pemikiran M, Natsir tentang negara. M. Natsir dipilih sebagai tokoh dalam studi ini, karena ia tidak saja sebagai pemikir dan penggagas semata atas produk pemikirannya tentang konsep Islam dan negara, tetapi ia juga diberi kesempatan oleh sejarah sebagai salah seorang pelaku dan pemeran utama dalam mengimplemtasikan gagasannya. Dilihat dari konstruksi argumentasinya, secara keseluruhan, selain terpengaruh pemikiran politik intelektual muslim masa klasik dengan karya-karya monumentalnya seperti al- Mawardi dengan al-Ahkam al-Sulthaniyyah, juga terpengaruh oleh pemikiran politik intelektual muslim modern seperti al-Maududi dan al-Afgani. Menurut Natsir, Islam dan negara itu berhubungan secara integral bersifat simbiosis, berhubungan secara resiprokal dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara, dan sebaliknya.

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pemikiran M. Natsir sedangkan perbedaanya adalah penelitian yang di lakukan oleh Amin Susilo mendeskripsikan Konsepsi Negara Menurut M. Natsir: Tinjauan Dari Perspektif Pemikiran Politik Islam sedangkan yang peneliti

lakukan mendeskripsikan tentang Konsep dan Implementasi M. Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Mardias Gufron yang berjudul “Negara Islam: studi terhadap pemikiran politik Mohammad Natsir” penelitian ini menfokuskan kajian penelitian pada pemikiran politik M. Natsir tentang Negara Islam dan beberapa aspek pemikirannya yang mengundang kontroversi. Pemikiran Politik yang di maksud di sini adalah upaya pencarian landasan intelektual bagi konsep negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriah maupun batiniah. Pemikiran politik M. Natsir dalam hal ini, merupakan Vtihad politik M. Natsir dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang berlangsung.

Kajian ini dilakukan guna menemukan penyebab dan faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya pemikiran politik M. Natsir tentang Negara Islam. Penelitian ini dilakukan juga guna menjelaskan aspek-aspek yang menjadi kontroversi dalam pemikiran politik Mohammad Natsir. Selain itu penelitian juga mencoba menjelaskan konsep negara Islam menurut pemikiran M. Natsir dan implikasi serta proyeksi ke depan pemikiran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode Hermeneutika. Hermeneutika adalah studi tentang prinsip-prinsip metodologis interpretasi dan eksplanasi. Hermeneutika yang dimaksud penulis di sini adalah *understanding process of understanding* (Proses

pemahaman terhadap sebuah pemahaman). Dalam kaitan ini penulis mencoba menginterpretasikan teks yang terdapat di dalam sumber data utama (buku tulis dan catatan) yang ditulis secara langsung oleh M. Natsir dan juga sumber data sekunder berupa catatan orang lain mengenai pemikiran Mohammad Natsir. Melalui metode ini penulis berupaya menjelaskan apa makna dari tafsir teks-teks dalam sumber data utama maupun sumber data sekunder tersebut, sehingga penulis dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi dalam teks.

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pemikiran M. Natsir sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mardias Gufon mendeskripsikan Negara Islam: studi terhadap pemikiran politik M. Natsir sedangkan yang peneliti lakukan mendeskripsikan tentang Konsep dan Implementasi M. Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Konsep

Woodruff (dalam Amin, 1987:21), mendefinisikan konsep sebagai berikut: (1) suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna, (2) suatu pengertian tentang suatu objek, (3) produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang

sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu. Dengan menggunakan definisi pembentukan konsep, Woodruff menyarankan bahwa suatu pernyataan konsepsi dalam suatu bentuk yang berguna untuk merencanakan suatu unit pengajaran adalah suatu deskripsi tentang sifat-sifat suatu proses, struktur atau kualitas yang dinyatakan dalam bentuk yang menunjukkan apa yang harus digambarkan atau dilukiskan sehingga siswa dapat melakukan persepsi terhadap proses, struktur atau kualitas bagi dirinya sendiri. Konsep merupakan gambaran umum yang bersifat abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, dan suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Suatu konsep adalah bagian dari patokan.

Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.

2.2.2 Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online: 2010) pengertian negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Konsepsi Kelsen mengenai Negara menekankan bahwa Negara merupakan suatu gagasan teknis semata-mata yang menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah teritorial terbatas. Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok di antaranya ialah satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan. Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya.

Negara merupakan subjek utama hukum internasional. Beberapa sarjana telah mengemukakan pendapatnya mengenai definisi negara. Henry C. Black mendefinisikan negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mampu

menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.

Negara adalah suatu struktur organisasi yang terdiri dari pemimpin, rakyat. Unsur dari sebuah negara adalah: Negara pasti memiliki seorang pemimpin untuk mengatur rakyatnya, Negara juga memiliki perdana menteri, Negara harus mempunyai undang-undang atau peraturan.

Kemerdekaan RI itu adalah hasil dari perjuangan dan tumpah darah seluruh rakyat Indonesia yang mati-matian mempertahankan Indonesia hingga tetes darah terakhir, kemerdekaan RI bukanlah hadiah/pemberian dari negara penjajah melainkan melalui perjuangan dan pengorbanan yang besar.

2.2.3 Teori Terbentuknya Negara

Hal penting dari pembicaraan tentang negara adalah hubungan negara dengan agama. Wacana ini mendiskusikan bagaimana posisi agama dalam konteks negara modern (*nation state*). Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam masih menjadi perdebatan yang intensif di kalangan para pakar Muslim hingga kini. Menurut Azyumardi Azra, perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir satu abad, dan masih berlangsung hingga dewasa ini. Menurut Azra, ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara dalam

Islam disulut oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan negara (*dawlah*). Berbagai eksperimen telah dilakukan untuk menyeleraskan antara *din* dan *dawlah* dengan konsep dan kultur politik masyarakat Muslim. Seperti halnya percobaan demokrasi di sejumlah negara di dunia, penyelerasan *din* dan *dawlah* di banyak Negara Muslim telah berkembang secara beragam. Perkembangan wacana demokrasi di kalangan negara Muslim dewasa ini semakin menambah maraknya perdebatan Islam dan negara.

Perdebatan Islam dan negara berangkat dari pandangan dominan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh (*syumuli*), yang mengatur semua kehidupan manusia, termasuk persoalan politik. Dari pandangan Islam sebagai agama yang komprehensif ini pada dasarnya Islam tidak terdapat konsep pemisahan antara agama (*din*) dan politik (*dawlah*). Argumentasi ini sering dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad di Madinah. Di kota hijrah ini, Nabi Muhammad berperan ganda, sebagai seorang pemimpin negara sekaligus sebagai kepala negara yang memimpin sebuah sistem pemerintahan awal Islam yang, oleh kebanyakan pakar, dinilai sangat modern di masanya.

Posisi ganda Nabi Muhammad di kota Madinah disikapi beragam oleh kalangan ahli. Secara garis besar perbedaan pandangan ini bermuara pada apakah Islam identik dengan negara atau sebaliknya Islam tidak meninggal konsep yang tegas tentang bentuk negara, mengingat sepeninggal Nabi Muhammad tidak seorang pun dapat

menggantikan peran ganda beliau, sebagai pemimpin dunia yang sekuler dan sipenerima wahyu Allah sekaligus.

Menyikapi realitas perdebatan tersebut, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa posisi Nabi saat itu adalah sebagai Rasul yang bertugas menyampaikan ajaran (Al-Kitab) bukan sebagai penguasa. Menurut Ibnu Taimiyah, walaupun ada pemerintahan, itu hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan agama dan kekuasaan bukanlah agama itu sendiri. Dengan ungkapan lain, politik atau negara dalam Islam hanyalah sebagai alat bagi agama, bukan eksistensi dari agama Islam.¹⁷ Pandangan Ibnu Taimiyah ini bersumber pada ayat Al-Qur'an (QS. 57: 25) yang artinya, *“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”* Bersandar pada ayat ini, Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa agama yang benar wajib memiliki buku petunjuk dan “pedang” penolong. Hal ini dimaksudkan bahwa kekuasaan politik yang disimbolkan dengan pedang menjadi sesuatu yang mutlak bagi

agama, tetapi kekuasaan itu bukanlah agama sendiri. Adapun politik, tidak lain sebatas alat untuk mencapai tujuan- tujuan luhur agama.

Mengeleborasi pandangan Ibnu Taimiyah di atas, Ahmad Syafi'i Ma'arif menjelaskan bahwa istilah *dawlah* yang berarti negara tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Istilah *dawlah* memang ada dalam Al-Qur'an pada *Al-Hasyr* (QS. 59: 7), tetapi ia tidak bermakna negara. Istilah tersebut dipakai secara figuratif untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan. Pandangan sejenis pernah juga dikemukakan oleh beberapa modernis Mesir, antara lain Ali Abdul Raziq dan Mohammad Husein Haikal. Menurut Haikal, prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh Al-Qur'an dan Al-Sunah tidak ada langsung yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam Islam tidak terdapat suatu sistem pemerintahan apapun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antara para warga negaranya, baik hak maupun kewajiban dan perasamaan di depan hukum, dan pelaksanaan urusan negara diselenggarakan atas dasar musyawarah (*syura*) dengan berpegang kepada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam.

Hubungan Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pandangan: *integralistik*, *simbiostik*, dan *sekularistik*.

a. Paradigma Integralistik

Paradigma integralistik hamper sama persis dengan pandangan negara teokrasi Islam. Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (*integrated*). Paham ini juga memberikan penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenai pemisahan antara agama (*din*) dan politik atau negara (*dawlah*).

Dalam pergulatan Islam dan negara modern, pola hubungan integratif ini kemudian melahirkan konsep tentang agama-negara, yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Dari sinilah kemudian paradigma integralistik identik dengan paham Islam *ad-Din wa Dawlah* (Islam sebagai agama dan negara), yang sumber hukum positifnya adalah hukum Islam (syariat Islam). Paradigma integralistik ini antara lain dianut oleh negara Kerajaan Saudi Arabia dan penganut paham Syi'ah di Iran. Kelompok pecinta Ali r.a. ini menggunakan istilah *Imamah* sebagaimana dimaksud dengan istilah *dawlah* yang banyak dirujuk kalangan Sunni.

b. Paradigma Simbiotik

Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (simbiosis

mutualita). Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama sebagai sumber moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya.

Paradigma simbiotik tampaknya bersesuaian dengan pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara sebagai alat agama di atas. Dalam kerangka ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut meligimitasi bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya kontrak sosial (*social contract*), tetapi diwarnai oleh hukum agama (*syariat*). Dengan kata lain, agama tidak mendominasi kehidupan bernegara, sebaliknya ia menjadi sumber moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Model pemerintahan negara Mesir dan Indonesia dapat digolongkan kepada kelompok paradigma ini.

c. Paradigm sekularistik

Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-

masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Negara adalah urusan publik, sementara agama merupakan wilayah pribadi masing-masing warga negara.

Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang laku adalah hukum yang berasal dari kesepakatan manusia melalui *social contract* yang tidak terkait sama sekali dengan hukum agama (syariat). Konsep sekularistik dapat ditelusuri pada pandangan Ali Abdul Raziq yang menyatakan bahwa dalam sejarah kenabian Rasulullah saw. Tidak ditemukan keinginan Nabi Muhammad untuk mendirikan Negara Islam. Negara Turki modern dapat digolongkan kedalam paradigma ini.

Integralisme atau nasionalisme integral adalah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah bangsa adalah suatu kesatuan organik. Konsep nasionalismenya bersifat iliberal dan anti-internasionalis serta mengutamakan kepentingan negara di atas individu dan umat manusia pada umumnya

Pengertian hubungan simbiotik adalah suatu hubungan dimana bentuk dari masing-masing kebudayaan hampir tidak berubah. Contoh: Pertukaran pelajar antar negara. Simbiotik adalah kombinasi probiotik dan prebiotik.

Dalam istilah politik, **sekularisme** adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal

seperti mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan pembedaan yang tidak adil dengan dasar agama.

2.2.4 Konsep Negara Menurut Tokoh Muslim

Menurut teori-teori politik Islam klasik, konsep negara merupakan inti filsafat politik Islam. Istilah negara (*dawlah*) dalam literatur Islam yaitu Al- Qur'an, memang tidak ditemukan satu ayatpun, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar Negara dapat ditemukan dalam kitab suci itu. Usaha memahami masalah politik dalam Islam memang bukan perkara sederhana. Hal itu menurut Nurcholis Madjid, karena ada dua alasan. *Pertama*, bahwa Islam telah membuat sejarah selama lebih dari 14 abad sehingga akan merupakan suatu kenaiifan jika dianggap bahwa selama waktu yang panjang tersebut segala sesuatu tetap stasioner dan berhenti. Sementara hanya sedikit sekali di kalangan kaum Muslim yang memiliki pengetahuan, apalagi kesadaran tentang sejarah itu. *Kedua*, selain beraneka ragamnya bahan-bahan kesejarahan yang harus dipelajari dan diteliti, dalam sejarah Islam juga terdapat perbendaharaan teoritis yang amat luas tentang politik yang hampir setiap kali muncul bersama dengan munculnya sebuah peristiwa sejarah.

Banyak diantara sarjana modern melukiskan Nabi Muhammad adalah “sebagai Nabi Penguasa atas komunitas Islam”, walaupun dalam kenyataannya nabi tidak pernah mengklaim dirinya sebagai penguasa. Nama Hasan Al-Mawardi (meninggal 1058) cukup terkenal dalam

sejarah Islam. Karyanya yang membicarakan secara luas mengenai pemerintahan dijadikan rujukan dalam zaman modern ini. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* (Hukum Pemerintahan) merupakan karangan ilmiah pertama tentang ilmu politik dan administrasi negara dalam sejarah Islam.

Seorang pemikir Islam yang mula-mula dianggap paling komprehensif menggagas konsep Negara Islam adalah Jamaluddin Al-Asadabadi (1838-1897) atau yang kemudian dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Setidaknya ada dua hal menurutnya yang mendorong kehendak untuk melaksanakan Negara Islam ini, yaitu:

1. Al-Afghani melihat betapa lemahnya umat Islam dan para penguasanya menghadapi imperialisme barat pada waktu itu, sehingga perlu dibangkitkan gerakan Pan-Islamisme untuk mempersatukan kekuatan politik Islam.
2. Gerakan semacam ini tidak mungkin lahir tanpa umat Islam merumuskan kembali Islam sebagai ideologi, nilai peradaban dan identitas kebudayaannya sendiri menghadapi tantangan modernitas barat. Dalam konsep Negara Islam terpadu semua itu, kata Al-Afghani, janganlah hanya membicarakan Islam dari sudutnya sebagai agama ritual yang sempit, tetapi bagaimana melakukan elaborasi secara intelektual-religius agar bisa mendiskusikan hal-hal seperti berkaitan dengan soal hukum Islam, soal kelembagaan sosial Islam, dan soal-soal berhubungan dengan

kekuasaan serta wilayah politik lainnya.

Gagasan Islam seperti itu yang kemudian sering dikatakan sebagai awal munculnya modernism Islam. Memang selain menumbuhkan semangat menentang terhadap hegemoni barat, tetapi kalau diambil positifnya secara jujur bahwa sikap militansi yang tampak bercorak fundamentalistik ini sesungguhnya juga mengandung keterbukaan. Ide dan konsep mengenai Negara Islam pada akhirnya sampai ke Indonesia dalam sejarah prakemerdekaan sampai pascakemerdekaan (juga di era reformasi ini.). Salah seorang pahlawan nasional, Muhammad Natsir sangat dikenal di Indonesia juga luar negeri sebagai seorang tokoh Islam yang gigih untuk membela Islam sebagai Dasar Negara. Ide dan pemikirannya telah membuat catatan sejarah baru bagi perkembangan umat Islam di Indonesia.

M. Natsir berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang ajarannya komprehensif dan mengatur segala aspek kehidupan manusia di muka bumi ini. 22 Politikus modern Islam ini dengan sangat gigih memperjuangkan Islam sebagai Dasar Negara dan memberikan konsep-konsep mengenai Negara.

Dalam sejarah peradaban Islam di dunia telah banyak melahirkan tokoh dan beragam pemikiran mereka mengenai Islam dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Diskursus yang selalu mencuat dan tidak kehabisan waktu bagi semua kalangan baik

akademisi maupun kalangan agamawan ialah diskursus tentang Negara Islam.

Term Negara Islam sangat sering didengar, apalagi dalam perkembangan sejarah Indonesia, yaitu terjadinya pemberontakan S. M. Kartosuwiryo di Jawa Barat yang kemudian berkembang ke daerah Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. Kartosuwiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia dengan dia sebagai amir (pemimpinnya). Namun pergerakan yang dianggap makar ini dapat juga pada akhirnya diberantas oleh pemerintah dengan sebuah operasi yang cukup dikenal yaitu Operasi Pagar Betis.

Baik oleh pemikir Islam besar dunia seperti Abul A'la Al-Maududi, Muhammad Assad, Jamaluddin Al-Afghani, Ayatullah Khomeini, dan lainnya. Dalam konteks perkembangan sejarah Indonesia, mulai dari prakemerdekaan sampai pasca kemerdekaan istilah Negara Islam muncul dan bahkan menjadi perdebatan sengit diantara para *Founding Father* dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Ada banyak tokoh intelektual Islam yang vokal menawarkan sebuah konsep Negara Islam dalam perpolitikan di tanah air (dengan cara konstitusional). Di antaranya ada M. Natsir, seorang tokoh Islam yang juga mantan Perdana Menteri di era Soekarno dan seorang pendiri Masyumi, kedua ada Zainal Abidin Achmad yang juga tokoh-tokoh sentral dalam Masyumi. Definisi Negara Islam menurut para tokoh nasional dan internasional Islam, di antaranya:

1. Rashid Rida, seorang ulama terkemuka di awal abad ke-20, yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep Negara Islam modern, menyatakan bahwa premis pokok dari konsep Negara Islam adalah bahwa syariat merupakan sumber hukum tertinggi. Dalam pandangannya, syariat mesti membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan implementasinya, dan adalah mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa kehadiran Negara Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang amat menentukan (*the single most decisive criterion*) untuk membedakan antara suatu negara Islam dengan negara non-Islam.
2. Surjopranoto (1871-1959), seorang pemimpin Sarekat Islam (SI) membuat pengertian sederhana tentang konsep Negara Islam yaitu suatu pemerintahan Islam.
3. Dr. Sukiman Wirjosanjoyo, seorang mantan Perdana Menteri di era Soekarno dan juga tokoh Sarekat Islam (SI) mendefinisikan Negara Islam adalah suatu kekuasaan Islam di bawah benderanya sendiri. Untuk menciptakan suatu kekuasaan Islam di Indonesia, menurut Sukiman merupakan tujuan kemerdekaan.
4. Zainal Abidin Achmad, seorang tokoh Masyumi juga memberikan konsep Negara Islam, menurutnya dalam suatu Negara Islam, rakyat mempunyai dua hak konstitusional, yaitu: a. Hak untuk membuat konstitusi, b. Hak untuk memilih kepala negara. Jadi

menurut Achmad, kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara Islam adalah sepenuhnya berada di tangan rakyat. Achmad tidak membela Teori Kedaulatan Tuhan seperti Ayatullah Khomeiny di Iran.

5. Muhammad Asad (1900-1992), teori Muhammad Asad mengenai Negara Islam banyak persamaannya dengan tokoh Islam modernis Indonesia. Asad mengambil Pakistan sebagai basis empiris bagi perumusan teori politiknya. Bagi Asad, yang sebelum memeluk Islam bernama, Leopold Weiss, suatu negara dapat menjadi benar-benar islami hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa dan dengan jalan menyatukan ajaran-ajaran itu ke dalam undang-undang. Menurut kerangka berpikirnya suatu negara yang dihuni oleh mayoritas Islam seperti halnya Indonesia tidak otomatis menjadi suatu negara Islam kecuali bila ajaran Islam tentang sosiopolitik dilaksanakan dalam kehidupan rakyat berdasarkan konstitusi. Inilah tema sentral dari Teori Politik Asad. Dalam penolakannya terhadap bentuk negara sekuler Asad berdalil, dalam suatu negara sekuler modern, tidak ada norma yang tetap yang dapat dipakai untuk menimbang yang baik dan buruk dan antara betul dengan yang salah. Satu-satunya kriteria yang mungkin ialah kepentingan bangsa. Dalam suatu Negara Islam menurut Asad nilai-nilai moral tidak berubah dari satu kasus ke kasus lain atau dari waktu ke waktu, tetapi

validitasnya tetap bertahan buat seluruh waktu dan kondisi. Fungsi suatu Negara Islam hanyalah sebagai sarana untuk memaksakan nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan sosiopolitik umat. Pendapatnya tidak berbeda dengan Ibnu Taimiyah, Fazlur Rahman dan M. Natsir. Mengenai kedaulatan negara, Asad menempuh jalan tengah antara kubu Maududi-Khomeini dan golongan modernis. Pada satu pihak ia membela dan mempertahankan hak-hak rakyat untuk memerintah namun pada sisi lain. Negara Islam menurut Asad yang eksistensinya bergantung pada kemauan rakyat dan ia berhak dikontrol olehnya, mendapatkan kedaulatan pada akhirnya dari Tuhan. Tetapi sebenarnya apa yang dimaksudkannya dengan kedaulatan Tuhan itu tidak lain dari kedaulatan syariah atas seluruh warga negara suatu Negara Islam.

6. M. Natsir (1908-1993), merupakan tokoh pendiri Masyumi yang sangat gigih dan vokal untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dalam pidatonya berjudul *Islam sebagai Dasar Negara*, di depan sidang Majelis Konstituante tahun 1957, Natsir mengatakan (berdalil) untuk dasar negara Indonesia hanya punya dua pilihan yaitu sekularisme (*la-diniyah*) dan paham agama (*dini*).
7. Suha Taji-Farouki (1996) dalam artikelnya yang berjudul "*Islamic State Theories and Contemporary Realities*" menyebutkan bahwa ada dua jenis teori tentang Negara Islam. Walaupun kedua teori itu tidak satu kata dalam hal apakah negara merupakan bagian penting

dan integral dari syariat atau hanya sekedar merupakan alat merealisasikan syariat. Dua-duanya sama-sama menekankan signifikansi posisi syariat dalam negara. Sebab bagi kedua teori tersebut, penerapan syariat merupakan komponen primer Negara Islam.

2.2.5 Bentuk-bentuk Negara

Negara sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, dalam konsep teori modern, negara terbagi ke dalam dua bentuk: *negara kesatuan (unitarianisme)* dan *negara serikat (federasi)*.

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan: *sentral* dan *otonomi*.

- a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.
- b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara

Malaysia dan pemerintahan pasca-Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke model ini.

Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.

Di samping dua bentuk ini, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok: *monarki*, *oligarki*, dan *demokrasi*.

Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya, monarki memiliki dua jenis: *monarki absolut* dan *monarki konstitusional*. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah Arab Saudi. Adapun, monarki konsitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahannya (perdana menteri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktik monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktikkan di beberapa negara, seperti, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Inggris. Dalam model monarki konstitusional ini, kedudukan raja hanya sebatas symbol negara.

Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Pemerintahan model demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu).

Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isi atau strukturnya.

Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah administratif di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial.

Puncak perjuangan bangsa tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai arti dan makna yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, karena Proklamasi Kemerdekaan itulah, perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu yang bahan-bahannya adalah buku-buku perpustakaan dan sumber-sumber lainnya yang kesmuanya berbasis kepustakaan (Hadi, 1995:3). Dengan metode penelitian kualitatif, peneliti melakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara memberikan keterangan dan gambaran yang sejelas-jelasnya secara sistematis, objektif, kritis dan analitis mengenai konsep negara menurut Mohammad Natsir.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis atau penelitian bibliografis, karena mengandalkan dokumentasi berupa teori-teori dari buku sebagai literatur. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan kedalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif (Moleong, 2012:5).

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh di lapangan sebagai pendukung ke arah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis. Data penelitian adalah “things know or assumed”, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang dianggap atau diketahui. Diketahui artinya sesuatu yang sudah terjadi sebagai fakta empirik. Manfaat data adalah untuk memperoleh dan mengetahui gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan, dan untuk membuat keputusan atau memecahkan persoalan, karena persoalan yang timbul pasti ada penyebabnya. Maka memecahkan persoalan ditujukan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan tersebut.

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu yang bahan-bahannya adalah buku-buku perpustakaan dan sumber-sumber lainnya yang kesemuanya berbasis kepustakaan (Hadi, 1995: 3).

3.2.2 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan literatur lain (Moleong, 2004: 157). Data yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini

adalah data kualitatif. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya tulis M. Natsir dalam majalah Panji Islam dan Pembela Islam pada masa sebelum kemerdekaan dan paska kemerdekaan sampai dengan dikeluarkannya dekrit presiden Soekarno dengan pembatasan pada konteks relasi Islam dan negara.

2. Sumber sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung yang dapat memberikan data tambahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan bantuan media cetak maupun media elektronik seperti buku dan internet guna mendukung penulisan penelitian (Dudung Abdurahman, 1999:30).

Adapun sumber sekunder dari penelitian ini yaitu berupa karya-karya para tokoh yang membahas mengenai M. Natsir dan pemikirannya baik dalam bentuk karya ilmiah maupun dalam bentuk berita. Dalam kaitannya dengan sumber data primer sebatas pengetahuan penulis, pikiran-pikiran M. Natsir banyak dituangkan dalam bentuk artikel untuk media masa Panji Islam dan Pembela Islam dan bukan dalam bentuk sebuah buku dengan substansi yang secara khusus membahas mengenai relasi antara agama dan negara. Akan

tetapi karya tulis dalam bentuk artikel tersebut kemudian pada beberapa waktu selanjutnya dipilah-pilah oleh seorang editor yang bernama D.P. Sati Alimin untuk dibukukan menjadi sebuah buku sebagai kumpulan artikel M. Natsir yang berjudul *Capita Selecta M. Natsir* pada tahun 1954.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan studi pustaka diperlukan pengetahuan tentang perpustakaan sebagai sumber literatur yang diperlukan dalam mencari materi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari literatur yang tersedia (Hadari Nawawi, 1993: 133).

Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku, majalah, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain-lain (Kartono, 1990:33). Data tersebut berfungsi sebagai wahana informasi terhadap materi yang akan dibahas dalam penelitian. Dengan adanya kemajuan teknologi maka peneliti juga bisa memanfaatkan internet dalam rangka studi pustaka untuk mengumpulkan data- data yang berkaitan dengan tema penelitian.

Studi pustaka ini diperlukan peneliti untuk menggali teori-teori yang telah ada, agar memperoleh orientasi yang luas dalam permasalahan yang dipilih. Menurut Koenjaraningrat (1986:19), keuntungan dari studi pustaka adalah: 1) memperdalam pengetahuan tentang masalah yang dipilih, 2) menegaskan landasan teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran, 3) mempertajam konsep yang digunakan sehingga mempermudah dalam perumusan, 4) menghindari terjadinya pengulangan dari suatu penelitian. Studi pustaka ini dilakukan sistem kartu/katalog atau menggunakan komputer dengan cara mencatat beberapa sumber tertentu yang berkaitan dengan penelitian dengan mencantumkan keterangan mengenai nama pengarang, judul buku maupun subyek yang dicari. Oleh karena itu perlu mengingat kata kunci yang terdapat dalam subyek yang dibahasnya, sehingga menemukan buku dan artikel yang dimaksudkan dalam katalog atau komputer. Buku-buku dan artikel yang telah ditemukan di perpustakaan dibaca dan dipahami, kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian diperoleh data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis data historis. Menurut Kuntowijoyo yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999:64), interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti

menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Menurut Helius Syamsuddin (1996:89) teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Menurut Nugroho Notosusanto (1978: 38) teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang dibutuhkan guna mengadakan penulisan sejarah.

Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 64), analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu kedalam suatu interpretasi menyeluruh. Menurut Sartono Kartodirdjo (1992:2), analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis itu. Data yang telah diperoleh diinterpretasikan, dianalisis isinya dan analisis data harus berpijak pada kerangka teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta yang relevan dengan penelitian.

Menurut Backer fakta-fakta sejarah dapat dibedakan menjadi; (a) fakta-fakta keras (*hard facts*), yaitu fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya; dan (b) fakta-fakta lunak (*cold facts*), fakta-fakta yang

belum dikenal dan masih perlu diselidiki kebenarannya (Dudung Abdurahman, 1999: 39).

Di dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, peneliti melakukan analisis data dan membandingkan data satu dengan yang lain sesuai data yang diinginkan sehingga didapatkan fakta-fakta sejarah yang benar-benar relevan. Fakta itu kemudian di seleksi, diklarifikasi, dan ditafsirkan. Fakta-fakta tersebut selanjutnya dirangkai untuk dijadikan bahan penulisan penelitian yang utuh dalam sebuah karya ilmiah.

3.5 Prosedur Penelitian Historis

Untuk mempermudah penelitian dan langkah yang dijalankan guna mendapatkan hasil yang optimal diperlukan adanya prosedur yang biasa digambarkan dalam pembagian (skema) berisi langkah sistematis yang menggambarkan kegiatan ini dari awal (persiapan) sampai dengan pembuatan laporan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian historis, maka skema dalam metode historis digambarkan sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani yang artinya memperoleh. Dalam pengertiannya yang lain adalah suatu teknik yang membantu kita untuk mencari jejak-jejak sejarah. Menurut G. J Rener (1997:37), heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum, dan sedikit

mengetahui tentang bagian-bagian yang pendek. Sidi Gazalba (1981: 15) mengemukakan bahwa heuristik adalah kegiatan mencari bahan atau menyelidiki sumber sejarah untuk mendapatkan hasil penelitian. Dengan demikian heuristik adalah kegiatan pengumpulan jejak-jejak sejarah atau dengan kata lain kegiatan mencari sumber sejarah.

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan menemukan sumber-sumber tertulis berupa buku-buku serta bentuk kepustakaan lain yang relevan dengan penelitian. Sumber tertulis berupa buku-buku dan literatur yang diperoleh dari beberapa perpustakaan, dan di antaranya: Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Mataram, Perpustakaan Jurusan FKIP, Perpustakaan Program Studi Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram, dan Perpustakaan daerah Kota Mataram.

2. Kritik

Setelah mengumpulkan data atau bahan, tahap berikutnya adalah langkah verifikasi atau kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Menurut Heliuss Samsudin (1984:103) keabsahan sumber dicari melalui pengujian mengenai kebenaran atau ketetapan sumber. Kritik terhadap sumber data dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern adalah kritik terhadap keaslian sumber, apakah sumber yang dikehendaki asli atau tidak, utuh atau turunan (salinan). Kritik ekstern dilakukan terhadap sumber yang diperoleh berdasarkan

bentuk fisik atau luarnya berupa bahan (kertas atau tinta) yang digunakan, jenis tulisan, gaya bahasa, hurufnya, dan segi penampilan yang lain. Uji keaslian sumber dilakukan dengan pertanyaan: kapan sumber dibuat?, di mana sumber dibuat?, siapa yang membuat?, dan dari bahan apa sumber dibuat?. Kritik ekstern dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat kapan sumber itu dibuat, di mana sumber itu dibuat, siapa pengarangnya dan bagaimana latar belakang pendidikan pengarang.

Kritik intern adalah kritik yang berhubungan dengan kredibilitas dari sumber sejarah apakah isi, fakta dan ceritanya dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Kritik intern dapat ditempuh dengan cara membandingkan berbagai isi dan fakta yang terdapat dalam sumber.

3. Interpretasi

Setelah sumber yang diperoleh dikritik, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan sumber tersebut dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan interpretasi, peneliti harus menghilangkan unsur subyektif yang disebabkan oleh keanekaragaman data yang diperoleh dari berbagai buku atau sumber lain melalui analisis terhadap sumber yang satu dengan sumber yang lain.

Menurut Nugroho Notosusanto (1978: 40), interpretasi adalah suatu usaha menafsirkan dan menetapkan makna serta hubungan dari fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan perbandingan antara fakta

yang satu dengan fakta yang lain, sehingga terbentuk rangkaian yang selaras dan logis. Sedangkan interpretasi atau analisis historis menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 64) bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk analisis.

Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan atau mengaitkan sumber sejarah yang satu dengan sumber sejarah lain, sehingga dapat diketahui hubungan sebab-akibat dari suatu peristiwa masa lampau yang menjadi obyek penelitian. Kemudian sumber tersebut ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang sebenarnya sehingga dapat dipahami makna tersebut sesuai dengan pemikiran yang logis berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. Dengan demikian dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan fakta sejarah atau sintesis sejarah.

4. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam penulisan sejarah. Langkah ini merupakan kegiatan menyusun fakta sejarah menjadi suatu kisah sejarah yang menarik dan dapat dipercaya kebenarannya. Dalam langkah ini diperlukan imajinasi untuk mengaitkan fakta satu dengan yang lain sehingga menjadi suatu kisah sejarah yang menarik. Pada tahap ini, menyusun fakta sejarah dibutuhkan kemampuan

mengungkapkan bahasa secara baik, kemampuan untuk menempatkan fakta sejarah sesuai dengan periode sejarah, kemampuan menjelaskan data yang telah ditemukan dengan menyajikan bukti-bukti dan membuat garis umum yang dapat diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca (Dudung Abdurahman, 1999:68).

